

BAB II

MUHAMMADIYAH SEBAGAI AKTOR KEMANUSIAAN INTERNASIONAL

Menurunnya peran negara dalam keterlibatannya pada aktivitas kemanusiaan menjadi penyebab mulai munculnya peran aktor-aktor kemanusiaan non-negara yang dinilai selalu siap dan aktif dalam situasi tanggap darurat kemanusiaan. Adapun aktor-aktor non-negara yang mulai tumbuh yakni seperti, Organisasi Internasional, Organisasi non-pemerintahan (NGO), Organisasi Keagamaan (FBO), kelompok-kelompok kepentingan (*Interest Group*) dan beberapa aktor-aktor lainnya.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan (NGO) lokal/nasional sekaligus Organisasi Keagamaan (FBO) yang berdiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak pemerintahan/negara. Keterlibatan Muhammadiyah sebagai *local/national NGO* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan tidak hanya berperan dalam aktivitas kemanusiaan didalam negeri, namun juga aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan pada level global.

A. Sejarah Muhammadiyah

Bulan Dzulhijjah tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 M merupakan momentum penting

lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisian atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Muhammadiyah didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis di Kampung Kauman, Yogyakarta (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010).

K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) merupakan seorang anak yang lahir dari seorang bapak, K.H. Abu Bakar (seorang Khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta) dan ibu Siti Aminah. Muhammad Darwis (nama kecil Ahmad Dahlan) tumbuh dalam lingkungan kampung Kauman yang religius. K.H. Ahmad Dahlan adalah pribadi yang memiliki kekhasan tersendiri yang lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kekhasan K.H. Ahmad Dahlan yakni usahanya melakukan pembaruan yang berjalan secara berkemajuan tanpa melalui pendahuluan atau prakondisi tertentu sebelumnya. Selain itu, K.H. Ahmad Dahlan termasuk pribadi yang selalu gelisah melihat praktek keagamaan umat Islam pada masanya, ia selalu memikirkan bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk memahami ajaran Islam agar nilainya dapat menjadi semangat umat Islam untuk melakukan perubahan sosial keagamaan bagi kepentingan masyarakat luas.

Gagasan pembaruan Muhammadiyah pada berbagai bidang kehidupan tidak bisa dilepaskan dari kepribadian K.H. Ahmad Dahlan, ia merupakan

pribadi yang rasional dengan suatu pendirian yang kuat untuk terus menerus mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang didasarkan pada akal (rasional) dan wahyu, dengan bekal ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji, baik ibadah haji untuk yang pertama kali yakni tahun 1889 maupun ibadah hajinya yang kedua yakni pada tahun 1903 (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). K.H. Ahmad Dahlan juga sempat bermukim di Timur Tengah selama 20 bulan. K.H. Ahmad Dahlan tidak memiliki pengalaman pendidikan Barat, tetapi memberi ruang yang luas bagi gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam (Mejelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010).

Semangat rasionalitas K.H Ahmad Dahlan tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan yang tengah berlangsung di Timur Tengah yang diprakaraisai oleh Djamaluddin Al-Afghani, Muhammadah Abduh, dan Rasyid Ridha serta tafsir Al-Manar, inilah yang menginspirasi gerakan pembaruan Ahmad Dahlan dan ia membuka pintu ijtihad seluas-luasnya dan menolak segala bentuk taklid, takhayul, bid'ah dan khurafat (Mejelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010).

Setelah ayahnya yakni K.H Abu Bakar wafat, K.H Ahmad Dahlan diangkat sebagai Khatib Amin oleh Keraton Yogyakarta untuk Masjid Besar Kauman Yogyakarta, menggantikan posisi ayahnya pada masa itu. Pada periode 1898-1910 ini merupakan masa-masa perjuangan K.H.Ahmad Dahlan yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Sejak menjadi khatib Amin, Ahmad

Dahlan melakukan beberapa tindakan yang pada saat itu dianggap menyimpang oleh para khatib lainnya. Bermula sejak gagasannya untuk membenarkan arah kiblat di Masjid Besar Kauman ditolak, dianggap sebagai Kiai kafir, hingga surau yang dimilikinya di hanguskan. Namun, dari semua rintangan yang dihadapinya tidak menjadikan semangat yang dimiliki K.H Ahmad Dahlan meredup. Beliau tetap semangat dalam menghembuskan nafas pembaruan untuk menunjang perjuangan yang dilakukannya demi kemurnian agama Islam.

Setelah berdiskusi dengan para murid sekaligus para sahabatnya, maka diambillah sebuah keputusan untuk mendirikan persyarikatan dengan nama Muhammadiyah (Febriansyah & dkk, 100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri, 2013). Surat Al-Imran ayat 104 merupakan salah satu inspirasi K.H Ahmad Dahlan dalam mengorganisir umat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran) yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunah. Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7 adalah pedoman Muhammadiyah dalam menjalankan setiap aktivitas sosial, sesuai pesan pendiri Muhammadiyah. Setiap harinya K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan kepada muridnya mengenai Ayat Al-Qur'an tersebut, tidak hanya menghafalkannya dan mengerti artinya, namun juga memaknai isi kandungan dalam Surat Al-Ma'un dan dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teologi Al-Ma'un inilah yang nantinya menjadi dasar kuat bagi setiap aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanamkan

semangat bersosial pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan sosial yang dimiliki Muhammadiyah bersifat inklusif, yakni mendukung dialog bersama serta keragaman beragama, sesuai dengan pesan yang diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Sehingga dalam menjalankan aktivitas sosial, Muhammadiyah terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang golongan bahkan agama. Hal tersebut dilakukan agar Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dapat melebur bersama dengan masyarakat dipenjuru negeri bahkan dunia (Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

Sejarah awal gerakan sosial Muhammadiyah sudah begitu jelas dengan kepedulian Muhammadiyah terhadap kaum tertindas, kaum dhuafa, dan yang dalam wacana sosial lebih dikenal sebagai kaum proletar (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). Dalam hal ini, legenda dari Teologi Al-Ma'un memperoleh pembenaran dan kesaksian faktual seperti halnya pada masa itu kegiatan perempuan Muhammadiyah menyantuni pekerja migran dari sekitar kota Yogyakarta dengan pemberian keterampilan kerja sekaligus bekal kepribadian. Kebesaran Muhammadiyah hingga saat ini lebih terletak pada amal nyata, yaitu amal usaha-amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Saat ini tercatat amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah seperti 8000 Sekolah mulai dari TK hingga SMA, 67 Pondok Pesantren, 172 Perguruan Tinggi, 457 Rumah Sakit, 82 Rehabilitasi Cacat, 6118 Masjid dan masih banyak lagi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Muhammadiyah bergerak

hampir disemua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perannya cukup berpengaruh di Indonesia.

Salah satu keunggulan yang dimiliki Muhammadiyah adalah kemampuannya untuk mengembangkan jaringan bahkan sampai ke manca negara. Saat ini sudah terbentuk 13 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM). Di benua Asia, terdapat PCIM Malaysia, PCIM Jepang, PCIM Iran, dan PCIM Islamabad, Pakistan. Sementara di benua Afrika Muhammadiyah terwakili dengan berdirinya PCIM di Kairo/Mesir, Libya, dan Sudan. Di benua Eropa telah berdiri PCIM United Kingdom (Inggris Raya), PCIM Prancis, PCIM Jerman, dan PCIM Belanda. Kemudian di benua Amerika dan benua Australia masing-masing telah berdiri PCIM Amerika dan PCIM Australia (Febriansyah & dkk, 100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri, 2013).

B. Sejarah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)

Dalam bidang kemanusiaan, Lembaga pembantu pimpinan Muhammadiyah yang pertama kali dibentuk adalah PKO (U) yang waktu itu sebagai akronim Penolong Kesengsaraan Oemoem. Dalam Mulkhan (2010) memaparkan bahwa sejarah ini bermula saat kegelisahan Haji Muhammad Syudjak, seorang santri dan teman dekat K.H. Ahmad Dahlan merenung dan terbayang tentang surat Al-Ma'un yang berulang-ulang diajarkan oleh K.H.

Ahmad Dahlan atau jumlah anaknya yang banyak diminta kembali oleh Allah setelah dipinjamkan kepadanya. Hingga pada akhirnya tahun 1920an, muncul sebuah ide yang dimiliki oleh Haji Syudjak untuk membuat rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim. Pada akhirnya setelah melakukan diskusi serta dukungan penuh dari K.H. Ahmad Dahlan, berdirilah Rumah Sakit PKO Muhammadiyah di jalan Ngabean. Lembaga ini merupakan salah satu manifestasi Muhammadiyah dalam bidang kemanusiaan pada abad pertama yakni berdiri pada tahun 1920-1936 (Nurkhasanah, 2014). Pada saat ini, lembaga tersebut telah berkembang menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada abad kedua, Muhammadiyah kembali mendirikan lembaga khusus dalam bidang kemanusiaan yakni Badan Penanggulangan Bencana (LPB) atau yang dapat disebut dengan *Muhammadiyah Disaster management Center (MDMC)* yang berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini. Menurut Rahmawati Husein (2016) menyampaikan bahwa pada awalnya aksi kemanusiaan Muhammadiyah masih berupa aksi tanggap darurat dan *ad hoc committee* (pendirian posko secara mandiri pada saat terjadi bencana). Dalam Pedoman Mekanisme Kerja MDMC (2012) menjelaskan bahwa semangat Al-Ma'un yang merupakan dasar pijakan dalam pengembangan awal gerakan "PKO-Penolong Kesengsaraan Oemoem" tahun 1912 sudah saatnya diterjemahkan kembali sebagai basis dalam gerakan penanggulangan bencana. Adapun visi pada periode awal yang berbunyi memajukan dan

menggemirakan hidup yang berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam memberikan semangat yang khas. Tujuan inilah yang kemudian mencoba membangun sebuah gagasan betindak bahwa kemajuan haruslah membawa kegembiraan, khususnya bagi anak-anak yang tidak terlindungi (yatim) dan kelompok miskin (inti surah Al-Ma'un). Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai perbedaan yang cukup mendasar dengan keadaan masyarakat sosial modern saat ini yang mengartikan sebuah kemajuan pasti memiliki hasil berupa penderitaan dan keterasingan bagi sebagian atau bahkan masyarakat luas, ataupun menghasilkan sebuah ketimpangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Menurut mantan ketua PP Muhammadiyah tahun 2005-2010 Dr. Sudibyo Markus dalam Pedoman Mekanisme Kerja MDMC (2012), Muhammadiyah menghadapi berbagai macam hambatan dalam mengimplementasikan semangat Al-Ma'un pada situasi sosial modern pada saat ini seperti pertama, Hambatan Kultural. Hambatan kultural yang dimaksudkan yakni adanya tarik menarik antara *political disengagement dan civic engagement*. Kedua, hambatan struktural yakni organisasi Muhammadiyah yang terlalu besar. Ketiga, hambatan paradigmatik yakni dalam pelaksanaan fungsi khafilah. Terakhir, hambatan programtik dimana Muhammadiyah terjebak dalam kegiatan kelembagaan, kurang fokus pada pendekatan "ummah" atau umat (masyarakat luas) (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012).

Padahal seperti pesan pendiri dari Muhammadiyah, bahwasanya sejak awal berdirinya Muhammadiyah menyiratkan konsep inklusivitas total dan universal sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Dari hambatan tersebut, kemudian terdapa dua prioritas Muhammadiyah dalam membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Hambatan tersebut yakni yang pertama *Back to Basics* (peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput) dan *Go International*. Keduanya saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi ditingkat global dengan akar rumput (*out there phenomena dengan in here phenomena*).

Dalam Pedoman Mekanisme Kerja MDMC (2012) pada tahun 2007 Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Pusat Penanggulangan Bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 58/KEP/I.0/2007 tentang penetapan Pengurus dengan ketua Dr. H.M. Natsir Nugroho, Sp.OG, M.Kes. Pembentukan ini berdasarkan rekomendasi Internal Pasal 1 keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 tahun 2005. Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah (Muhammadiyah Disaster Management Center – MDMC) yang telah dirintis pada tahun 2007 berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 58/KEP/I.0/2007 berdasarkan pada rekomendasi internal yang terdapat dalam pasal 1 keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 tahun 2005. Pada Muktamar ke 46 pada tahun 2010, LPB diubah dan

ditetapkan menjadi *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010)

MDMC bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan definisi kegiatan penanggulangan bencana baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga Rehabilitasi. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara Internasional, pelaksanaan aktivitas diarahkan pada pendekatan Manajemen Bencana yang merujuk pada Kerangka Aksi *Hyogo Framework for Action* untuk mengupayakan pengurangan risiko bencana sebagai inisiatif global dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat komunitas, sekolah dan rumah sakit sebagai basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012).

Sebagai lembaga baru yang merupakan pengembangan dari unit kegiatan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Periode 2005-2010, Lembaga Penanggulangan Bencana dengan cepat melakukan konsolidasi sumber daya Muhammadiyah yang memungkinkan digerakkan dalam program penanggulangan bencana, dengan tetap menjaga tradisi Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), spirit Al-Maun dan berbasis kepada kekuatan kemandirian akar rumput yang merupakan kekuatan Muhammadiyah hingga terus berkembang hingga lebih dari satu abad.

Secara khusus, visi pengembangan Lembaga Penanggulangan Bencana periode 2010-2015 adalah “Berkembangnya fungsi dan system penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoen (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat”, yang oleh Mukhtar Muhammadiyah 2010 diterangkan dalam Program Pengembangan Penanggulangan Bencana yang tercantum di bawah ini (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012):

1. Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan UMKESOS dan Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat (response time dan mobilisasi), peningkatan kualitas

manajemen dan pengadaan logistic tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana.

Pada pelaksanaannya, program pengembangan diatas, dirumuskan dalam ciri pengembangan yang terdiri dari Sistem Gerakan, Organisasi dan Kepemimpinan, Jaringan, Sumberdaya, dan Aksi Pelayanan (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015).

Dalam pengembangan sistem gerakan MDMC membuat sebuah naskah yakni Fikih Penanggulangan Bencana yang dikembangkan bersama dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Pandangan terkini masyarakat luas mengenai bencana hanya berfokus pada terjadinya bencana tersebut. Tidak mengetahui lebih jauh upaya manusia mengenali ancaman dari bencana tersebut, peningkatan kapasitas, hingga membangun rencana-rencana penanganan baik pencegahan maupun penanggulangannya. Buku Fikih Kebencanaan ini memuat tentang segala panduan keagamaan soal bencana, baik untuk pencegahan atau penanggulangannya. Dalam kesepakatan Sendai atau *Chart of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* tahun 2015-2030, tertera sebuah kesepakatan masyarakat dunia dalam upaya pendekatan yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih terpusat pada manusia dalam pencegahan risiko bencana. Praktik pengurangan risiko bencana harus berbasis multi-hazzard dan multi sector, inklusif, dan dapat diakses secara

efisien dan efektif. Terkait hal tersebut, Fikih kebencanaan ini merupakan buku panduan keagamaan pertamakali didunia yang memuat berbagai hal diatas secara komprehensif. (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012)

Dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan, MDMC melakukan upaya koordinasi dan konsolidasi pada tingkat nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tahun 2011 dan 2014 yang diikuti juga dengan kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Pimpinan Wilayah, pendirian LPB PWM di 20 Provinsi dan berlakunya panduan mekanisme organisasi dan pengembangan panduan operasional tanggap darurat (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Secara terbatas telah dikembangkan pula pusat logistic nasional di Yogyakarta beserta mekanismenya dan inisiasi terbatas pusat pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Majelis Pembina Kesehatan Umum. (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012)

Dalam pengembangan Sumberdaya, MDMC mengadakan pelatihan relawan Muhammadiyah melalui pengembangan kurikulum, silabus dan modul pelatihan, pelatihan relawan kesehatan, pelatihan SAR, psikososial, logistic dan juga pendidikan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan regional dan latihan gabungan relawan yang telah dilaksanakan baik di tingkat nasional,

serta pengadaan perlengkapan kegiatan tanggap darurat di tingkat nasional bersama Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). MDMC juga mengadakan penguatan kompetensi di luar negeri melalui pelatihan di Bangkok, Singapura, dan Kuala Lumpur. Kerjasama pengadaan perangkat operasi juga dilakukan dengan relasi dari luar negeri seperti Palang Merah Singapura. Kerjasama penguatan kompetensi khususnya bidang kesehatan juga bekerjasama dengan lembaga luar negeri melalui program AIFDR yang merupakan kerjasama Pemerintah Australia dan BNPB (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015).

Dalam pengembangan aksi pelayanan, Muhammadiyah melalui MDMC aktif dalam memberikan bantuan tanggap darurat dan rehabilitasi dalam koordinasi bersama Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 terdapat 5 kejadian bencana, tahun 2011 terdapat 10 kejadian bencana, tahun 2012 terdapat 15 kejadian bencana, tahun 2013 terdapat 18 kejadian bencana, tahun 2014 terdapat 8 kejadian bencana dan pada tahun 2015 terdapat 4 kejadian bencana. Pada kejadian bencana erupsi Merapi tahun 2010 MDMC bekerjasama dalam pengadaan bantuan kemanusiaan dari lembaga luar negeri, seperti dengan Pemerintahan Australia, World Vision, Direct Relief International, dan lain-lain (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015).

Dalam pengembangan jaringan, MDMC menjalin hubungan yang intensif dan saling menguntungkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil bidang penanggulangan bencana dan kemanusiaan ditingkat nasional, serta hubungan baik dengan lembaga penanggulangan bencana Internasional. Dalam upaya bersama membangun jaringan pengurangan risiko bencana dan kerja-kerja kemanusiaan melalui posisi Muhammadiyah diakui oleh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di tingkat nasional sehingga masuk dalam Dewan Pengarah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015). Muhammadiyah melalui MDMC juga berperan sebagai pimpinan Humanitarian Forum Indonesia, serta aktif dalam koordinasi Kluster Kesehatan dan koordinasi Kluster Pendidikan (Rahmawati Husein S. M., 2016).

Kegiatan yang lain berupa aktifnya dalam upaya advokasi kebijakan seperti upaya penerbitan kebijakan tentang Fasilitas Kesehatan yang aman dari Kedaruratan dan Bencana bersama Kementerian Kesehatan, upaya penerbitan kebijakan Sekolah Aman bersama Kementerian Pendidikan. Pengembangan jaringan di internal Muhammadiyah, seperti adanya komunikasi aktif dengan mengerjakan program bersama di lapangan secara terbatas seperti dengan majelis tarjih mengembangkan fikih penanggulangan

bencana, majelis lingkungan hidup mengembangkan rehabilitasi lingkungan merapi, majelis pendidikan tinggi mengembangkan inisiasi pusat studi dan penelitian penanggulangan bencana, majelis Pembina kesehatan umum mengembangkan Rumah Sakit Siaga Bencana dan penguatan kemampuan manajemen kedaruratan dan bencana bagi karyawan rumah sakit, majelis pemberdayaan masyarakat mengembangkan rehabilitasi pertanian dan ekonomi, serta adanya kerjasama dengan LAZISMU yang merupakan lembaga zakat, infaq, dan sedekah yang dimiliki Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem fundrising penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan serta penerapan sekolah siaga bencana (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2015).

Dalam buku pedoman struktur, organisasi, dan mekanisme kerja MDMC (2015) menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang mengatur sistem kerjasama penanggulangan bencana. Sistem kerjasama penanggulangan bencana ini terbagi menjadi sistem kerjasama lembaga dalam lingkungan organisasi Muhammadiyah, sistem kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, sistem kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan lembaga PBB, sistem kerjasama dengan perusahaan, serta sistem kerjasama dengan Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi. Kerjasama dengan segala pihak didasarkan pada prinsip-prinsip kemartabatan sebagai bangsa, saling menghormati, dan kesetaraan, serta adanya salinan kontrak yang harus

terdapat pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, meliputi penyiapan dukungan kebijakan, Data dan Informasi, Pendanaan, dan *Resource person (Expert)*. Adapun lingkup kerjasama dengan Pemerintah asing dititik beratkan pada sharing informasi, dukungan pendanaan, dukungan Expert, dan pertukaran pengetahuan. Dalam kerjasama dengan Perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri difokuskan pada dukungan pendanaan, dukungan Expert, dukungan peralatan, dan dukungan manajemen informasi. Terdapat catatan khusus dalam kerjasama dengan Perusahaan, yakni perusahaan yang tidak merusak lingkungan, perusahaan yang tidak memberi dampak pada masyarakat khususnya anak, perusahaan yang tidak menindas buruh dan memperkerjakan anak-anak. Kemudian kerjasama dengan Masyarakat sipil Internasional meliputi dukungan pendanaan, dukungan Expert, dukungan relawan, dan jaringan kerjasama. Sedangkan kerjasama dengan Masyarakat sipil Indonesia meliputi dukungan pendanaan, dukungan expert, dukungan relawan, jaringan (networking), pemberdayaan komunitas, pengembangan metodologi pengelolaan bencana, advokasi, publikasi dan sharing informasi (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015). Dan yang terakhir yakni kerjasama dengan perguruan tinggi meliputi kerjasama riset, expert, pendidikan dan pelatihan, dan mobilisasi Relawan.

Adapun keterlibatan aktor-aktor diluar keanggotaan Muhammadiyah dapat dilihat dari berbagai macam bentuk kerjasama atau kolaborasi dalam aktivitas kemanusiaan universal sebagai berikut:

Tabel 2.1 Organisasi Internasional yang Berkolaborasi dengan Muhammadiyah pada tahun 2004-2010

Kategori	Aktor	Area Aktivitas	Peristiwa Bencana
Organisasi Berbasis Agama (FBOs)	Father Chris Riley's Youth Off the Street (YOT) Australia	Child Safety/Panti Asuhan	Tsunami Aceh 2004
	Catholic Relief Service	Peralatan kesehatan/Rekonstruksi klinik	Tsunami Aceh 2004
	Islamic Relief	Respon tanggap darurat	Tsunami Aceh 2004
	World Vision International	Pendidikan	Tsunami Aceh 2004
		Family Kits Mata pencaharian berkelanjutan	Erupsi Merapi dan Gempa Yogyakarta 2006
	Won Buddhism, Korea	Hunian sementara	Gempa Yogyakarta 2006
		Kursi roda dan kruk	
	Knight of Malta – Singapore	Selimut – respon tanggap darurat	Erupsi Gunung Merapi 2010
World Islamic Call Society, Libya	Bahan pangan - beras	Gempa Yogyakarta 2006	
Lembaga Internasional (Pemerintah)	Pemerintah Australia – Ausaid	Pendidikan	Gempa Yogyakarta 2006
		Respon tanggap darurat	Gempa Sumatra Barat, Erupsi

			Gunung Merapi
	Pemerintah Jepang – JICA	Ambulans/kesehatan	Tsunami Aceh 2004
	Pemerintah Amerika Serikat – USAID	Pembersihan reruntuhan – dalam bentuk tunai untuk program kerja	Tsunami Aceh 2004
	Negara-negara Arab (Saudi Arabia, Oman)	Makanan, pakaian , perlengkapan kebersihan, dan perlengkapan sholat	Tsunami Aceh 2004
Lembaga UN – Institusi Internasional (bilateral dan multilateral)	UNICEF	Pusat Nutrisi Anak, perlengkapan kebersihan	Tsunami Aceh 2004 dan Gempa Yogyakarta 2006
	IOM	Evakuasi dan transportasi logistik	Tsunami Aceh 2004
	UNFPA	Respon tanggap darurat	Tsunami Aceh 2004
	UN- WFP	Makanan	Tsunami Aceh 2004
	Islamic Development Bank	Rekonstruksi	Gempa Yogyakarta 2006
NGOs Internasional	Direct Relief International	Dukungan Kesehatan : obat-obatan dan peralatan medis/ambulans	Tsunami Aceh 2004
			Gempa Yogyakarta 2006
			Gempa Sumatra Barat 2009
			Erupsi Gunung Merapi 2010
	The Asia Foundation (TAF)	Operasi Tanggap Darurat, Stasiun Radion	Tsunami Aceh 2004
Give2Asia	Tim Medis, Microfinance,	Tsunami Aceh 2004	

		rekonstruksi sekolah	Gempa Yogyakarta 2006
	Mercy Relief Singapore	Rekonstruksi Sekolah	Tsunami Aceh 2004
	OXFAM	Suplai Air dan sanitasi, tunai untuk program kerja	Tsunami Aceh 2004
	Basic Human Need (BHN)	Transitor radio	Tsunami Aceh 2004
	International Red Crescent (IRC)	Makanan	Tsunami Aceh 2004

Sumber : Husein dalam Fajriyah (2014, pp. 39-41)

C. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sebagai Aktor Kemanusiaan Internasional

Dalam Farjriyah (2014) menjelaskan bahwa perkembangan isu kemanusiaan semakin terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dunia internasional semakin di sibukkan dengan berbagai isu kemanusiaan yang tidak kunjung usai. Salah satu isu kemanusiaan yang berkembang saat ini yakni pengurangan/penanggulangan resiko bencana. Hal ini mengharuskan setiap aktor untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan aksi nyata. Untuk merespon hal ini, peningkatan kapasitas individu dan masyarakat terhadap dampak resiko bencana menjadi fokus utama aktor kemanusiaan-kebencanaan sebagai proses Pengurangan Resiko Bencana.

Peran Muhammadiyah dalam aktivitas kemanusiaan Internasional semakin meningkat setiap tahunnya. Di dunia Internasional Muhammadiyah

dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Dalam Fariyah (2014) menjelaskan bahwa pada tahun 2006 bersama berbagai NGOs kemanusiaan, Muhammadiyah membentuk Forum Kemanusiaan Internasional di London. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama, salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Isu bencana dalam *community based disaster reduction management* (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai *Islamic Society/Civil Society* yang bertempu pada konsep surat Al-Ma'un, yang mengandung proses seperti Kariatif, Pemberdayaan, Takaful (modal sosial), Ketahanan sosial, dan Masyarakat yang beradab (*civil society*) (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Muhammadiyah melalui MDMC juga ikut terlibat dalam forum-forum Internasional.

Keterlibatannya dalam merespon peristiwa kebencanannya tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar batas negara. Selama berkelut dalam bidang penanggulangan bencana alam, Muhammadiyah melalui MDMC pernah ikut terlibat langsung dalam beberapa kejadian bencana alam yang melanda wilayah di luar batas negara atau pengiriman medis Internasional. Pertama yakni pada kejadian bencana alam Topan Haiyan di Filipina, *Muhammadiyah Disaster Management Center(MDMC)* ikut terlibat dalam proses penanggulangan bencana tersebut. Menurut Dr. Corona (2016), salah satu dokter yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut menjelaskan bahwa

Muhammadiyah hadir secara Independen ke wilayah terdampak bencana di Filipina, hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia tidak mengirimkan tim medisnya ke wilayah tersebut. Kedua, yakni pada kejadian bencana alam Gempa di Nepal. Pada peristiwa ini, Muhammadiyah bekerjasama dengan pemerintahan Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan Internasional. Muhammadiyah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dompet Dhuafa, dan lain-lain merupakan perwakilan yang didelegasikan pemerintah Indonesia ke Nepal (2016).

Selain aktif berperan dalam misi bantuan kemanusiaan dalam diskursus kebencanaan di dunia Internasional, Muhammadiyah melalui MDMC juga aktif berperan sebagai peserta pelatihan dalam forum-forum Internasional. Selain menjadi peserta pelatihan, MDMC kerap diundang sebagai pembicara, fasilitator, hingga pelatih dalam pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga Internasional seperti PBB, UNICEF, UNOCHA, Pemerintahan Australia, dan NGO Internasional seperti Direct Relief International, Help Age International, dan Word Vision (Aji, MDMC dalam kemanusiaan Interanasional, 2016). Hal tersebut merupakan sebuah bukti kepercayaan masyarakat luas bahkan dunia kepada keberhasilan pelaksanaan program atau aktivitas manajemen kebencanaan yang dimiliki oleh *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*. Muhammadiyah melalui MDMC juga merupakan satu-satunya lembaga kemanusiaan sudah

memiliki *Emergency Medical Team (EMT)* yang belum dimiliki oleh satupun lembaga kemanusiaan di Indonesia, hal ini mendapatkan pengakuan langsung dari *World Health Organization (WHO)* (Aji, MDMC dalam kemanusiaan Interanasional, 2016). Dalam Program Rumah Sakit Aman yang telah dirintis oleh MDMC sejak tahun 2008, MDMC bekerjasama secara intensif dengan pemerintahan Australia (*Australian Aid*) hingga saat ini (Aji, MDMC dalam kemanusiaan Interanasional, 2016).

Kehadiran *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* semakin meningkat dalam kancah Internasional. Selain sukses dalam kegiatan tanggap bencana internasional, seperti Gempa di Nepal, Topan Haiyan di Filipina, dan berbagai pengalaman dalam bidang kerelawanan di berbagai tempat, keterlibatan Muhammadiyah melalui MDMC juga dipercayai oleh ajang kesiapsiagaan bencana berskala besar. MDMC dipercayakan mengikuti “*The International Conference on the implementation of the Health Aspects of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-1030*” yang diselenggarakan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) di Bangkok, Thailand pada 10 Maret 2016 hingga 11 Maret 2016 (Suara Muhammadiyah, 2016). Dalam konferensi internasional tersebut, MDMC memaparkan argumentasinya terkait pengurangan risiko bencana sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh MDMC sendiri. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah dokumen Pengurangan Risiko Bencana Bidang

Kesehatan (PRB Kesehatan) yang kemudian dikenal sebagai Bangkok Principles (Suara Muhammadiyah, 2016).

Pada bulan Mei tahun 2016 MDMC melalui perwakilnya Dr. Rahmawati Husein ditunjuk sebagai salah satu Sterling Commite dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kemanusiaan Dunia atau World Humanitarian Summit (WHS) yang berlangsung di Istanbul, Turki pada tanggal 23-24 Mei 2016 (Suara Muhammadiyah, 2016). Pertemuan tersebut merupakan prakarsa Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk menyatukan masyarakat dunia dalam menegaskan kembali solidaritas pada orang-orang yang terdampak krisis dan komitmen pada kemanusiaan (Suara Muhammadiyah, 2016). KTT Kemanusiaan tersebut ditujukan untuk bertukar pengalaman serta menunjukkan inovasi dan praktik terbaik dari berbagai pihak pelaku kemanusiaan. KTT tersebut juga mendiskusikan peran organisasi berbasis keagamaan dalam upaya kemanusiaan baik untuk perdamaian, saat perang dan konflik, saat bencana serta peluang pendanaan dari masyarakat Islam baik dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada kesempatan tersebut, MDMC membagikan buku Fikih Kebencanaan yang merupakan dasar dan panduan kerja MDMC dalam melaksanakan aktivitas Kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut, MDMC membagikan buku tersebut dengan edisi bahasa Inggris yakni *“Coping With Disaster : Principle Guidance from an Islamic Perspective”* kepada seluruh peserta KTT. Hal tersebut dilakukan MDMC untuk menunjukkan adanya kontribusi pemikiran masyarakat Islam terhadap

pentingnya memahami bencana dan menunjukkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan prinsip dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Rahmawati Husein S. M., 2016).

Pada bulan November tahun 2016, MDMC kembali mengikuti Konferensi Tingkat Menteri Asia di Vigyan Bhawan. Konferensi tersebut bertopik “*Disaster Preparedness for Effective Response and to Build Back Better*”. Dalam konferensi tersebut MDMC diminta untuk menyampaikan program Rumah Sakit Aman yang telah dirintis oleh MDMC sejak tahun 2008. MDMC menyampaikan bahwa program Rumah Sakit Aman yang dilakukan MDMC, didasarkan kepada konsep *Comprehensive Safe Hospital* bagi kapasitas fasilitas kesehatan dan komunitas disekitarnya. Konferensi tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. Win Myat Aye (Menteri Kesejahteraan Sosial Pemerintah Myanmar), Krishna Raut (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Nepal), Yukimoto Ito (Wakil Walikota Sendai – Jepang), Brendan Moon (Kepala Eksekutif Badan Pemulihan Pemerintah Queensland), dan Bolorma Nordov (Sekjend Palang Merah Mongolia). (Suara Muhammadiyah, 2016)

D. Kendala Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai aktor kemanusiaan Internasional

Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kemanusiaan Internasional, tentunya setiap aktor kemanusiaan menghadapi berbagai masalah. Hal

tersebut sama halnya dengan *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* menghadapi berbagai macam kendala dalam hal keterlibatannya dalam aktivitas kemanusiaan di luar batas negara. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya datang dari faktor internal namun tidak menutup kemungkinan masalah juga datang dari faktor external.

Kendala-kendala yang dihadapi Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan Internasional dipetakan menjadi dua yakni kendala internal dan kendala external. Kendala internal yang dihadapi seperti, keterbatasan dana yang dimiliki Muhammadiyah, dimana dana yang dimiliki Muhammadiyah yakni berasal dari khas bulanan anggota dan Zakat, Infaq, Sedekah yang masih tersebar dalam masyarakat luas melalui lembaga penggalangan dana Muhammadiyah yakni LAZISMU (Latief, 2017). Adapun kendala mengenai keterbatasan dana yang dimiliki MDMC dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan Internasional ini mengingat bahwa MDMC merupakan lembaga khusus dalam bidang kebencanaan yang belum lama hadir dalam dunia Internasional. Selain itu, kendala internal yang dihadapi seperti keterbatasan tim relawan MDMC yang belum begitu mahir dalam hal berbahasa asing khususnya bahasa Inggris (Rahmawati Husein S. M., 2016). Hal ini mengingat bahwa bahasa merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam hal komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas kemanusiaan Internasional.

Sedangkan kendala external yang dihadapi Muhammadiyah seperti, keterbatasan peran aktor non-negara dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan di luar batas negara, hal ini terkait dengan beberapa mekanisme dan prosedur yang dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia yang harus dipenuhi oleh aktor kemanusiaan dalam melaksanakan aktivitasnya di luar batas negara. Serta adanya prosedur atau mekanisme Internasional yang dimiliki oleh sebuah negara terkait mekanisme penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri.